

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA LAPORAN KEUANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGHASILAN KARYAWAN TETAP KSU TUNAS SEJAHTERA JAWA TIMUR

Khasanah Sahara

Dosen Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi UNISKA Kediri

ABSTRAK

Jenis Pajak Penghasilan ada bermacam-macam, namun dalam penelitian ini hanya ditekankan pada Jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mempunyai keterkaitan dengan *Take Home Pay Karyawan*. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun.

Penelitian ini dilaksanakan di Tunas Sejahtera Jawa Timur. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah PPh Pasal 21, Laporan Keuangan dan Penghasilan Karyawan Tetap. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

KSU Tunas Sejahtera Jatim adalah sebuah koperasi yang bergerak pada bidang usaha simpan pinjam. Sebagian karyawan tetapnya telah memenuhi PKP namun pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan diserahkan kepada karyawan. Untuk meningkatkan kepatuhan karyawan dalam membayar PPh Pasal 21 atas gaji karyawan maka perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan THR karyawan oleh pihak KSU Tunas Sejahtera, namun hal ini akan mempengaruhi pendapatan karyawan tetapnya.

Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pihak koperasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.212.888, pada tahun 2009 sebesar Rp. 914.498 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 739.262. Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan oleh koperasi memberikan dampak pada perubahan pernyataan gaji karyawan pada perhitungan SHU koperasi, yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 61.187.112, pada tahun 2009 sebesar Rp. 89.211.802 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 109.616.663.

Pemotongan Pajak Penghasilan karyawan tetap dilakukan oleh perusahaan maka terjadi pengurangan jumlah pendapatan karyawan tetap sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dikenakan pada karyawan yang gajinya telah memenuhi PTKP.

Kata kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Atas penghasilan yang diterimanya, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan tersebut. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan tidak

terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Berdasarkan self assessment system, Wajib Pajak yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya Pajak Terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Jenis Pajak Penghasilan ada bermacam-macam, namun dalam penelitian ini hanya ditekankan pada Jenis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mempunyai keterkaitan dengan Take Home Pay Karyawan. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun. Sedangkan arti dari Take Home Pay itu sendiri adalah penghasilan yang akan karyawan bawa pulang. Take Home Pay dapat diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto karyawan dengan PPh pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karyawan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang jumlahnya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan.

PPh pasal 21 untuk penghasilan karyawan KSU Tunas Sejahtera Jawa Timur yang telah memenuhi PTKP dibayarkan dan dilaporkan sendiri oleh karyawan. KSU Tunas Sejahtera Jawa Timur memiliki karyawan tetap sebanyak 6 orang dengan jumlah karyawan yang memiliki penghasilan diatas PTKP sebanyak 4 orang.

Pada karyawan yang memiliki pendapatan melebihi PTKP akan mengalami pengurangan pendapatan sesuai dengan tarif pajaknya sedangkan karyawan yang pendapatannya masih dibawah PTKP cenderung tetap.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pada laporan keuangan khususnya laba rugi dan pengaruhnya terhadap penghasilan karyawan tetap di KSU Tunas Sejahtera Jawa Timur Tahun 2008 – 2010.

Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 pada laporan keuangan khususnya laba rugi terhadap penghasilan karyawan tetap di KSU Tunas Sejahtera Jawa Timur Tahun 2008 - 2010.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, pada KSU Tunas Sejahtera Jawa Timur dengan fokus penelitian pada perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Karyawan Tetap. KSU Tunas Sejahtera Jawa Timur beralamat di Ruko Brawijaya Blok C No. 12 Kediri

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1. Primer, 2. Sekunder

Variabel dalam penelitian ini meliputi :
a. PPh Pasal 21, b. Laporan Keuangan, dan
c. Penghasilan Karyawan Tetap

Penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kasus yang penyajiannya dengan menggunakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu mengadakan penelitian ke

objek penelitian dengan tujuan menguraikan dan memberikan gambaran untuk mengetahui dan mempelajari secara intensif tentang permasalahan perusahaan.

2. Pada tahun 2009 terdapat 4 orang karyawan tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP

3. Pada tahun 2010 terdapat 4 orang karyawan tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP

PEMBAHASAN

Berdasarkan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima karyawan maka dapat dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 untuk masing-masing karyawan sebagai berikut :

A. Perhitungan PPh Pasal 21

1. Pada tahun 2008 terdapat 3 orang karyawan tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP

B. Pelaporan Pajak Penghasilan

Pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji karyawan selama ini dilakukan secara mandiri oleh karyawan yang bersangkutan, demikian juga dengan proses pembayarannya sehingga tidak mempengaruhi pembayaran pajak PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan, maka laporan SHU Koperasi tetap, sebagai

Tabel 12. PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM KOTA KEDIRI PER 31 DESEMBER 2008

URAIAN		2008	
PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN	Rp. 213.697.401	
2	PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI	Rp. 25.146.000	
3	PENDAPATAN DENDA	Rp. 59.542.182	
TOTAL PENDAPATAN			Rp. 298.385.583
PENGELUARAN			
1	BEBAN ORGANISASI		
f.	Rapat Kerja Pengurus	Rp. 232.500	
g.	Rapat Kerja Pengawasan	Rp. 279.500	
h.	Rapat Gabungan Pengurus, Pengawas	Rp. 768.800	
i.	Perjalanan Dinas	Rp. 400.000	
j.	RAT	Rp. 3.958.900	
			Rp. 5.639.700
2	Beban Administrasi dan Umum		
i.	Gaji Karyawan	Rp. 62.400.000	
j.	Tunjangan Hari Raya	Rp. 2.500.000	
k.	Administrasi	Rp. 5.877.050	
l.	Seragam Karyawan	Rp. 1.400.000	
m.	Listrik, Telp, Air	Rp. 2.378.396	
n.	Penyusutan Inventaris	Rp. 2.816.330	
o.	Cadangan Resiko	Rp. 13.000.000	
p.	Perawatan	Rp. 834.000	
			Rp. 91.205.776
3	Beban Operasional		
f.	Jasa PM	Rp. 104.565.764	
g.	Transpot Penagihan	Rp. 8.585.866	
h.	Intensif Karyawan	Rp. 16.234.900	
i.	Jasa Simpanan Sukarela	Rp. 11.713.454	
j.	Lain-lain	Rp. 8.682.500	
			Rp. 146.732.740
SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK			Rp. 243.578.216
Pajak			Rp. 54.807.367
SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK			Rp. 5.480.736
			Rp. 49.326.630

Tabel 13. PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM KOTA KEDIRI PER 31 DESEMBER 2009

URAIAN		2009
PENDAPATAN		
1	PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN	Rp. 237.395.031
2	PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI	Rp. 32.490.825
3	PENDAPATAN DENDA	Rp. 89.934.685
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 359.820.541
PENGELUARAN		
1	BEBAN ORGANISASI	
i.	Rapat Kerja Pengurus	Rp. 76.000
j.	Rapat Pengawasan	Rp. 50.000
k.	Rapat Pengr, Peng & Pengawas	Rp. 1.468.050
l.	Rapat Keluar / Dinas	Rp. 1.516.000
m.	Kursus	Rp. -
n.	RAT	Rp. 2.949.400
o.	Jasa Pengurus dan Pengawasan	Rp. 6.000.000
p.	Pemberian hadiah Nasabah	Rp. 1.584.600
		Rp. 13.644.050
2	Beban Administrasi dan Umum	
k.	Gaji Ketua/Manager/Karyawan	Rp. 90.126.300
l.	Tunjangan Hari Raya	Rp. 2.750.000
m.	Administrasi	Rp. 5.279.000
n.	Seragam Karyawan	Rp. 1.050.000
o.	Listrik, Telp, Air	Rp. 2.496.136
p.	Perawatan Inventaris	Rp. 410.000
q.	Renovasi Kantor	Rp. 500.000
r.	Beban Sewa Kantor	Rp. 7.000.000
s.	Beban Penyusutan	Rp. 5.633.910
t.	Biaya Pinjaman Resiko	Rp. 13.000.000
		Rp. 128.245.346
3	Beban Operasional	
f.	Jasa PM	Rp. 104.565.764
g.	Simpanan sukarela	Rp. 8.585.866
h.	Operasional	Rp. 16.234.900
i.	Lain-lain	Rp. 7.826.000
j.	Intensif Karyawan	Rp. 28.640.568
		Rp. 165.853.098
JUMLAH PENGELUARAN		Rp. 307.742.494
SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		Rp. 50.078.047
Pajak		Rp. 5.207.804
SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK		Rp. 46.870.242

Sumber : KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM

Tabel 14. PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM KOTA KEDIRI PER 31 DESEMBER 2010

URAIAN		2009
PENDAPATAN		
1	PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN	Rp. 238.470.223
2	PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI	Rp. 22.635.072
3	PENDAPATAN DENDA	Rp. 74.400.251
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 335.523.546
PENGELUARAN		
1	BEBAN ORGANISASI	
j.	Rapat Kerja Pengurus	Rp. 550.000
k.	Rapat Pengawasan	Rp. 240.000
l.	Rapat Pengr, Peng & Pengawas	Rp. 1.194.000
m.	Rapat Keluar / Dinas	Rp. 400.000
n.	Kursus	Rp. 0
o.	RAT	Rp. 2.372.200
p.	Jasa Pengurus dan Pengawasan	Rp. 6.000.000
q.	Pemberian hadiah Nasabah	Rp. 1.180.000
r.	Persiapan membuka cabang	Rp. 600.000
		Rp. 12.536.200
2	Beban Administrasi dan Umum	
k.	Gaji Ketua/Manager/Karyawan	Rp. 110.355.925
l.	Tunjangan Hari Raya	Rp. 3.000.000
m.	Administrasi	Rp. 6.576.000
n.	Seragam Karyawan	Rp. 1.460.000
o.	Listrik, Telp, Air	Rp. 2.514.662
p.	Perawatan Inventaris	Rp. 325.000
q.	Renovasi Kantor	Rp. 0
r.	Beban Sewa Kantor	Rp. 0
s.	Beban Penyusutan	Rp. 2.815.080
t.	Biaya Pinjaman Resiko	Rp. 13.000.000
		Rp. 140.046.667
3	Beban Operasional	
f.	Jasa PM	Rp. 108.975.764
g.	Simpanan sukarela	Rp. 8.906.760
h.	Operasional	Rp. 17.384.050
i.	Lain-lain	Rp. 3.853.900
j.	Intensif Karyawan	Rp. 3.651.372
		Rp. 142.771.846
JUMLAH PENGELUARAN		Rp. 259.354.713
SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		Rp. 40.168.833
Pajak		Rp. 5.021.104
SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK		Rp. 35.147.729

Sumber : KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh maka jika pelaporan pajak penghasilan karyawan tetap dimasukkan kedalam laporan laba rugi koperasi dan pemotongan pajak dilakukan dengan menggunakan NPWP koperasi maka

dalam laporan laba rugi terjadi perubahan dan terdapat penambahan akun PPh terhutang serta pada gaji karyawan terdapat pengurangan sebesar PPh pasal 21 yang dipotong perusahaan. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan adalah sebagai berikut :

Karyawan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Rp 493.713	Rp 443.763	Rp 191.348
2	Rp 485.439	Rp 119.598	Rp 328.218
3	Rp 233.736	Rp 215.261	Rp 185.598
4	-	Rp 135.876	Rp 34.098
Jumlah	Rp 1.212.888	Rp 914.498	Rp 739.262

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pihak koperasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.212.888, pada tahun 2009 sebesar Rp. 914.498 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 739.262. maka terjadi perubahan pada jumlah gaji yang dibayarkan kepada karyawan sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Jumlah Gaji Karyawan Sebelum Pajak	Rp 62.400.000	Rp 90.126.300	Rp 110.355.925
Jumlah Pemotongan PPh Pasal 21	Rp 1.212.888	Rp 914.498	Rp 739.262
Sisa Gaji	Rp 61.187.112	Rp 89.211.802	Rp 109.616.663

Mengacu perhitungan gaji karyawan tersebut maka terjadi perubahan laporan SHU sebagai berikut :

Tabel 15. PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM KOTA KEDIRI PER 31 DESEMBER 2008

URAIAN	2008	
PENDAPATAN		
1 PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN	Rp. 213.697.401	
2 PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI	Rp. 25.146.000	
3 PENDAPATAN DENDA	Rp. 59.542.182	
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 298.385.583
PENGELUARAN		
1 BEBAN ORGANISASI		
a. Rapat Kerja Pengurus	Rp. 232.500	
b. Rapat Kerja Pengawasan	Rp. 279.500	
c. Rapat Gabungan Pengurus, Pengawas	Rp. 768.800	
d. Perjalanan Dinas	Rp. 400.000	
e. RAT	Rp. 3.958.900	
		Rp. 5.639.700
2 Beban Administrasi dan Umum		
a. Gaji Karyawan	Rp. 61.187.112	
b. Tunjangan Hari Raya	Rp. 2.500.000	
c. Administrasi	Rp. 5.877.050	
d. Seragam Karyawan	Rp. 1.400.000	
e. Listrik, Telp, Air	Rp. 2.378.396	
f. Penyusutan Inventaris	Rp. 2.816.330	
g. Cadangan Resiko	Rp. 13.000.000	
h. Perawatan	Rp. 834.000	
		Rp. 89.992.888
3 Beban Operasional		
a. Jasa PM	Rp. 104.565.764	
b. Transpot Penagihan	Rp. 8.585.866	
c. Intensif Karyawan	Rp. 16.234.900	
d. Jasa Simpanan Sukarela	Rp. 11.713.454	
e. Lain-lain	Rp. 8.682.500	
		Rp. 146.732.740
4 PPh 21 atas Gaji dan bonus Karyawan Terhutang	Rp. 1.212.888	
JUMLAH PENGELUARAN		Rp. 243.578.216
SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		Rp. 54.807.367
Pajak		Rp. 5.480.736
SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK		Rp. 49.326.630

Sumber : Data yang diolah

Tabel 16. PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM KOTA KEDIRI PER 31 DESEMBER 2009

URAIAN		2009
PENDAPATAN		
1	PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN	Rp. 237.395.031
2	PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI	Rp. 32.490.825
3	PENDAPATAN DENDA	Rp. 89.934.685
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 359.820.541
PENGELUARAN		
1	BEBAN ORGANISASI	
a.	Rapat Kerja Pengurus	Rp. 76.000
b.	Rapat Pengawasan	Rp. 50.000
c.	Rapat Pengr, Peng & Pengawas	Rp. 1.468.050
d.	Rapat Keluar / Dinas	Rp. 1.516.000
e.	Kursus	Rp. -
f.	RAT	Rp. 2.949.400
g.	Jasa Pengurus dan Pengawasan	Rp. 6.000.000
h.	Pemberian hadiah Nasabah	Rp. 1.584.600
		Rp. 13.644.050
2	Beban Administrasi dan Umum	
a.	Gaji Ketua/Manager/Karyawan	Rp. 89.211.802
b.	Tunjangan Hari Raya	Rp. 2.750.000
c.	Administrasi	Rp. 5.279.000
d.	Seragam Karyawan	Rp. 1.050.000
e.	Listrik, Telp, Air	Rp. 2.496.136
f.	Perawatan Inventaris	Rp. 410.000
g.	Renovasi Kantor	Rp. 500.000
h.	Beban Sewa Kantor	Rp. 7.000.000
i.	Beban Penyusutan	Rp. 5.633.910
j.	Biaya Pinjaman Resiko	Rp. 13.000.000
		Rp. 127.330.848
3	Beban Operasional	
a.	Jasa PM	Rp. 104.565.764
b.	Simpanan sukarela	Rp. 8.585.866
c.	Operasional	Rp. 16.234.900
d.	Lain-lain	Rp. 7.826.000
e.	Intensif Karyawan	Rp. 28.640.568
		Rp. 165.853.098
4	PPh 21 Atas Gaji dan bonus Karyawan Terhutang	Rp. 914.498
JUMLAH PENGELUARAN		Rp. 307.742.494
SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		Rp. 50.078.047
Pajak		Rp. 5.207.804
SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK		Rp. 46.870.242

Sumber : KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM

Tabel 17. PERHITUNGAN HASIL USAHA KSU TUNAS SEJAHTERA JATIM KOTA KEDIRI PER 31 DESEMBER 2010

URAIAN		2009
PENDAPATAN		
1	PENDAPATAN BUNGA PINJAMAN	Rp. 238.470.223
2	PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI	Rp. 22.635.072
3	PENDAPATAN DENDA	Rp. 74.400.251
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 335.523.546
PENGELUARAN		
1	BEBAN ORGANISASI	
a.	Rapat Kerja Pengurus	Rp. 550.000
b.	Rapat Pengawasan	Rp. 240.000
c.	Rapat Pengr, Peng & Pengawas	Rp. 1.194.000
d.	Rapat Keluar / Dinas	Rp. 400.000
e.	Kursus	Rp. 0
f.	RAT	Rp. 2.372.200
g.	Jasa Pengurus dan Pengawasan	Rp. 6.000.000
h.	Pemberian hadiah Nasabah	Rp. 1.180.000
i.	Persiapan membuka cabang	Rp. 600.000
		Rp. 12.536.200
2	Beban Administrasi dan Umum	
a.	Gaji Ketua/Manager/Karyawan	Rp. 109.616.663
b.	Tunjangan Hari Raya	Rp. 3.000.000
c.	Administrasi	Rp. 6.576.000
d.	Seragam Karyawan	Rp. 1.460.000
e.	Listrik, Telp, Air	Rp. 2.514.662
f.	Perawatan Inventaris	Rp. 325.000
g.	Renovasi Kantor	Rp. 0
h.	Beban Sewa Kantor	Rp. 0
i.	Beban Penyusutan	Rp. 2.815.080
j.	Biaya Pinjaman Resiko	Rp. 13.000.000
		Rp. 139.307.405
3	Beban Operasional	
a.	Jasa PM	Rp. 108.975.764
b.	Simpanan sukarela	Rp. 8.906.760
c.	Operasional	Rp. 17.384.050
d.	Lain-lain	Rp. 3.853.900
e.	Intensif Karyawan	Rp. 3.651.372
		Rp. 142.771.846
4	PPh 21 Atas Gaji dan bonus Karyawan Terhutang	Rp. 739.262
JUMLAH PENGELUARAN		Rp. 259.354.713
SISA HASIL USAHA (SHU) SEBELUM PAJAK		Rp. 40.168.833
Pajak		Rp. 5.021.104
SISA HASIL USAHA (SHU) SETELAH PAJAK		Rp. 35.147.729

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan maka diperoleh perubahan gaji karyawan yang memiliki pendapatan diatas PTKP sebagai berikut :

Tabel 18. Perhitungan Pendapatan Bersih Karyawan KSU Tunas Sejahtera Jatim Kota Kediri Per 31 Desember 2008

Karyawan	Tahun 2008		
	Pendapatan Sebelum Pajak	PPh Pasal 21	Pendapatan Bersih
1	Rp 1.600.000	Rp 12.425	Rp 1,587,575
2	Rp 1.500.000	Rp 17.675	Rp 1,482,325
3	Rp 1.300.000	Rp 8.175	Rp 1,291,825
4			

Sumber : Data yang diolah

Tabel 19. Perhitungan Pendapatan Bersih Karyawan KSU Tunas Sejahtera Jatim Kota Kediri Per 31 Desember 2009

Karyawan	Tahun 2009		
	Pendapatan Sebelum Pajak	PPh Pasal 21	Pendapatan Bersih
1	Rp 1.600.000	Rp. 425	Rp. 1.599.575
2	Rp 1.500.000	Rp . 5.925	Rp. 1.494.075
3	Rp 1.200.000		Rp. 1.200.000
4	Rp 1.400.000		Rp. 1.400.000

Sumber : Data yang diolah

Tabel 20. Perhitungan Pendapatan Bersih Karyawan KSU Tunas Sejahtera Jatim Kota Kediri Per 31 Desember 2010

Karyawan	Tahun 2010		
	Pendapatan Sebelum Pajak	PPh Pasal 21	Pendapatan Bersih
1	Rp1.800.000	Rp 9.925	Rp1.790.075
2	Rp1.600.000	Rp 1.175	Rp1.598.825
3	Rp1.600.000	Rp11.425	Rp1.588.575
4	Rp1.450.000		Rp1.450.000

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui

bahwa jika pemotongan pajak penghasilan karyawan tetap dilakukan oleh perusahaan maka terjadi pengurangan jumlah pendapatan karyawan tetap sesuai dengan jumlah pajak penghasilan yang dikenakan pada karyawan yang gajinya telah memenuhi PTKP.

KESIMPULAN

1. KSU Tunas Sejahtera Jatim adalah sebuah koperasi yang bergerak pada bidang usaha simpan pinjam. Sebagian karyawan tetapnya telah memenuhi PKP namun pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan diserahkan kepada karyawan.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan karyawan dalam membayar PPh Pasal 21 atas gaji karyawan maka perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan THR karyawan oleh pihak KSU Tunas Sejahtera, namun hal ini akan

- mempengaruhi pendapatan karyawan tetapnya.
3. Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pihak koperasi pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.212.888, pada tahun 2009 sebesar Rp. 914.498 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 739.262.
 4. Pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan oleh koperasi memberikan dampak pada perubahan pernyataan gaji karyawan pada perhitungan SHU koperasi, yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 61.187.112, pada tahun 2009 sebesar Rp. 89.211.802 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 109.616.663.
 5. Pemotongan Pajak Penghasilan karyawan tetap dilakukan oleh perusahaan maka terjadi pengurangan jumlah pendapatan karyawan tetap sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dikenakan pada karyawan yang gajinya telah memenuhi PTKP.

SARAN

1. Hendaknya KSU Tunas Sejahtera melakukan pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 langsung atas pendapatan karyawan tetap untuk meningkatkan kepatuhan karyawan dalam melakukan pembayaran PPh Pasal 21.
2. KSU Tunas Sejahtera hendaknya menambah personalia untuk melakukan perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan baik PPh Pasal 21 atas pendapatan karyawan tetap maupun KSU serta pajak-pajak yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Basri, Yuswar Zainul. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar*

Negeri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Casavera. 2009. *Seri Perpajakan Indonesia-5*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan; Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan; Lengkap dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supramono, et.all, 2005. *Perpajakan Indonesia; Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.